



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 153/PP.01-Kpt/01/KPU/IX/2017

TENTANG

STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN/KELOMPOK KERJA
DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA
DALAM RANGKA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2017, 2018 DAN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah ditetapkan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu 2019, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan/Kelompok Kerja (Pokja) pada KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan KPU/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten/Kota;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu ditetapkan Standar Tim Pelaksana Kegiatan/Kelompok Kerja (Pokja) di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memerhatikan: Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Serentak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN/KELOMPOK KERJA DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Standar Tim Pelaksana Kegiatan/Kelompok Kerja (Pokja) di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam lampiran 1, Lampiran 2, Lampiran 3, Lampiran 4, Lampiran 5 dan Lampiran 6 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini;
- KEDUA : Besaran Satuan Biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan/Kelompok Kerja pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sebagaimana tercantum pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/ Walikota Serentak;
- KETIGA : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan/Kelompok Kerja Pelaksana Kegiatan/Kelompok Kerja pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana DIKTUM KESATU, mempedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono



LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 153/PP.01-Kpt/01/KPU/IX/2017
 TENTANG
 STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN/KELOMPOK KERJA DI
 LINGKUNGAN KPU PROVINSI/KIP ACEH DALAM RANGKA
 PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 TAHUN ANGGARAN 2017

STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN/KELOMPOK KERJA DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI/KIP ACEH DALAM RANGKA
 PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2017

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | KETERANGAN |
|----|--|------------------------|--------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Penyusunan perencanaan, program dan anggaran Pemilu | paling banyak 20 orang | OB | masa kerja paling lama 3 bulan |
| 2 | Penyusunan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana Pemilu | paling banyak 20 orang | OB | masa kerja paling lama 3 bulan |
| 3 | Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu | paling banyak 35 orang | OB | masa kerja paling lama 3 bulan |
| 4 | Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu | paling banyak 30 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 5 | Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu | paling banyak 30 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 6 | Publikasi Informasi Pemilu | paling banyak 25 orang | OB | masa kerja paling lama 3 bulan |
| 7 | Supervisi Pencalonan Pemilu | paling banyak 25 orang | OB | masa kerja paling lama 3 bulan |
| 8 | Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu | paling banyak 25 orang | OB | masa kerja paling lama 3 bulan |
| 9 | Peliputan, Pemberitaan dan Publikasi Pemilu | paling banyak 30 orang | OB | masa kerja paling lama 3 bulan |
| 10 | Pendidikan Pemilih Pemilu | paling banyak 20 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 11 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
 Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 153/PP.01-Kpt/01/KPU/IX/2017
TENTANG
STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN/KELOMPOK KERJA DI
LINGKUNGAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA
PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2017

STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN/KELOMPOK KERJA DI LINGKUNGAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA
PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2017


| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | KETERANGAN |
|----|--|------------------------|--------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Penyusunan perencanaan, program dan anggaran Pemilu | paling banyak 10 orang | OB | masa kerja paling lama 3 bulan |
| 2 | Penyusunan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana Pemilu | paling banyak 12 orang | OB | masa kerja paling lama 3 bulan |
| 3 | Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu | paling banyak 25 orang | OB | masa kerja paling lama 3 bulan |
| 4 | Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu | paling banyak 20 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 5 | Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu | paling banyak 15 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 6 | Publikasi Informasi Pemilu | paling banyak 10 orang | OB | masa kerja paling lama 3 bulan |
| 7 | Supervisi Pencalonan Pemilu | paling banyak 12 orang | OB | masa kerja paling lama 3 bulan |
| 8 | Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu | paling banyak 15 orang | OB | masa kerja paling lama 3 bulan |
| 9 | Peliputan, Pemberitaan dan Publikasi Pemilu | paling banyak 10 orang | OB | masa kerja paling lama 3 bulan |
| 10 | Pendidikan Pemilih Pemilu | paling banyak 15 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono



LAMPIRAN 3
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 153/PP.01-Kpt/01/KPU/IX/2017
 TENTANG
 STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN/KELOMPOK KERJA DI
 LINGKUNGAN KPU PROVINSI/KIP ACEH DALAM RANGKA
 PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN/KELOMPOK KERJA DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI/KIP ACEH DALAM RANGKA
 PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2018

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | KETERANGAN |
|----|---|------------------------|--------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Penyusunan perencanaan, program dan anggaran Pemilu | paling banyak 20 orang | OB | masa kerja paling lama 6 bulan |
| 2 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Serta Laporan Penggunaan Anggaran Pemilu | paling banyak 20 orang | OB | masa kerja paling lama 3 bulan |
| 3 | Penyusunan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana | paling banyak 20 orang | OB | masa kerja paling lama 3 bulan |
| 4 | Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota | paling banyak 50 orang | OB | masa kerja paling lama 10 bulan |
| 5 | Verifikasi Faktual dan Penetapan Peserta Pemilu | paling banyak 40 orang | OB | masa kerja paling lama 3 bulan |
| 6 | Fasilitasi Pembentukan PPK dan PPS | paling banyak 20 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 7 | Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih | paling banyak 30 orang | OB | masa kerja paling lama 6 bulan |
| 8 | Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan | paling banyak 25 orang | OB | masa kerja paling lama 3 bulan |
| 9 | Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPD | paling banyak 25 orang | OB | masa kerja paling lama 3 bulan |
| 10 | Pendaftaran dan verifikasi Calon Anggota DPR, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota | paling banyak 25 orang | OB | masa kerja paling lama 3 bulan |
| 11 | Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 | paling banyak 30 orang | OB | masa kerja paling lama 3 bulan |
| 12 | Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD | paling banyak 20 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 13 | Kampanye Calon Anggota Presiden dan Wakil Presiden | paling banyak 20 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 14 | Laporan dan Audit Dana Kampanye | paling banyak 20 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 15 | Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih | paling banyak 25 orang | OB | masa kerja paling lama 4 bulan |
| 16 | Kerjasama dengan instansi terkait/Pengamanan | paling banyak 25 orang | OB | masa kerja paling lama 6 bulan |
| 17 | Pengelolaan Barang Logistik Pemilu/BMN | paling banyak 15 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 18 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tahapan Pemilu | paling banyak 25 orang | OB | masa kerja paling lama 4 bulan |
| 19 | Supervisi dan Bantuan Hukum Pemilu | paling banyak 20 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 20 | Pengawasan Anggaran Pemilu | paling banyak 20 orang | OB | masa kerja paling lama 4 bulan |

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 11 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT JENDERAL
 KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
 Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono



LAMPIRAN 4
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 153/PP.01-Kpt/01/KPU/IX/2017
TENTANG
STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN/KELOMPOK KERJA DI
LINGKUNGAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA
PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2018

STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN/KELOMPOK KERJA DI LINGKUNGAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA
PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2018

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | KETERANGAN |
|----|---|---------------------------|--------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Penyusunan perencanaan, program dan anggaran Pemilu | paling banyak 12 orang | OB | masa kerja paling lama 6 bulan |
| 2 | Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Serta Laporan Penggunaan Anggaran Pemilu | paling banyak 12 orang | OB | masa kerja paling lama 3 bulan |
| 3 | Penyusunan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana | paling banyak 10 orang | OB | masa kerja paling lama 3 bulan |
| 4 | Verifikasi Faktual dan Penetapan Peserta Pemilu | paling banyak 25 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 5 | Fasilitasi Pembentukan PPK dan PPS | paling banyak 15 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 6 | Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih | paling banyak 20 orang | OB | masa kerja paling lama 6 bulan |
| 7 | Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan | paling banyak 15 orang | OB | masa kerja paling lama 3 bulan |
| 8 | Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPD | paling banyak 15 orang | OB | masa kerja paling lama 3 bulan |
| 9 | Pendaftaran dan verifikasi Calon Anggota DPR, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota | paling banyak 15 orang | OB | masa kerja paling lama 3 bulan |
| 10 | Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 | paling banyak 12 orang | OB | masa kerja paling lama 3 bulan |
| 11 | Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD | paling banyak 10 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 12 | Kampanye Calon Anggota Presiden dan Wakil Presiden | paling banyak 10 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 13 | Laporan dan Audit Dana Kampanye | paling banyak 10 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 14 | Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih | paling banyak 15 orang | OB | masa kerja paling lama 4 bulan |
| 15 | Fasilitasi Pengamanan Pemilu | paling banyak 18 orang | OB | masa kerja paling lama 6 bulan |
| 16 | Dokumen BMN Logistik Pemilu | paling banyak 10 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 17 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tahapan Pemilu | paling banyak 15 orang | OB | masa kerja paling lama 4 bulan |
| 18 | Supervisi dan Bantuan Hukum Pemilu | paling banyak 10 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 19 | Pengawasan Anggaran Pemilu | paling banyak 10 orang | OB | masa kerja paling lama 4 bulan |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,
Sigit Joyowardono

LAMPIRAN 5
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 153/PP.01-Kpt/01/KPU/IX/2017
TENTANG
STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN/KELOMPOK KERJA DI
LINGKUNGAN KPU PROVINSI/KIP ACEH DALAM RANGKA
PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
TAHUN ANGGARAN 2019

STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN/KELOMPOK KERJA DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI/KIP ACEH DALAM RANGKA
PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2019

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | KETERANGAN |
|----|---|------------------------|--------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Penyusunan perencanaan, program dan anggaran Pemilu | paling banyak 20 orang | OB | masa kerja paling lama 4 bulan |
| 2 | Penyusunan Produk-Produk Hukum (Peraturan dan Keputusan) | paling banyak 20 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 3 | Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 | paling banyak 20 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 4 | Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota | paling banyak 50 orang | OB | masa kerja paling lama 10 bulan |
| 5 | Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden | paling banyak 20 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 6 | Laporan dan Audit Dana Kampanye | paling banyak 20 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 7 | Penyelesaian Sengketa Hukum | paling banyak 20 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 8 | Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara | paling banyak 20 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 9 | Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu | paling banyak 20 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 10 | Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih | paling banyak 20 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 11 | Pendidikan Pemilih | paling banyak 20 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 12 | Bimbingan Teknis Tata Cara Perhitungan Suara Pemilu | paling banyak 20 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 13 | Fasilitasi Pengamanan Pemilu | paling banyak 20 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 14 | Dokumen BMN Logistik Pemilu | paling banyak 20 orang | OB | masa kerja paling lama 4 bulan |
| 15 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tahapan pemilu | paling banyak 20 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 16 | Supervisi dan Bantuan Hukum Pemilu | paling banyak 20 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 17 | Pengawasan Anggaran Pemilu | paling banyak 20 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 18 | Fasilitasi Kampanye | paling banyak 20 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 19 | Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Pilpres Putaran II Tahun 2019 | paling banyak 20 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 20 | Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara | paling banyak 20 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 21 | Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden | paling banyak 20 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 22 | Penetapan Hasil Pemilu | paling banyak 20 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum

Sigit Joyowardono



LAMPIRAN 6
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 153/PP.01-Kpt/01/KPU/IX/2017
TENTANG

STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN/KELOMPOK KERJA DI LINGKUNGAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2019

STANDAR TIM PELAKSANA KEGIATAN/KELOMPOK KERJA DI LINGKUNGAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TAHUN ANGGARAN 2019

| NO | URAIAN | VOLUME | SATUAN | KETERANGAN |
|----|---|------------------------|--------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Penyusunan perencanaan, program dan anggaran Pemilu | paling banyak 10 orang | OB | masa kerja paling lama 3 bulan |
| 2 | Penyusunan Produk-Produk Hukum (Peraturan dan Keputusan) | paling banyak 10 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 3 | Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 | paling banyak 17 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 4 | Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden | paling banyak 10 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 5 | Laporan dan Audit Dana Kampanye | paling banyak 10 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 6 | Penyelesaian Sengketa Hukum | paling banyak 10 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 7 | Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara | paling banyak 20 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 8 | Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu | paling banyak 10 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 9 | Sosialisasi, Publikasi dan Pendidikan Pemilih | paling banyak 10 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 10 | Pendidikan Pemilih | paling banyak 10 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 11 | Fasilitasi Pengamanan Pemilu | paling banyak 10 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 12 | Dokumen BMN Logistik Pemilu | paling banyak 10 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 13 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tahapan pemilu | paling banyak 10 orang | OB | masa kerja paling lama 4 bulan |
| 14 | Supervisi dan Bantuan Hukum Pemilu | paling banyak 10 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 15 | Pengawasan Anggaran Pemilu | paling banyak 10 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 16 | Fasilitasi Kampanye | paling banyak 10 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 17 | Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Pilpres Putaran II Tahun 2019 | paling banyak 10 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 18 | Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara | paling banyak 10 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 19 | Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden | paling banyak 10 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |
| 20 | Penetapan Hasil Pemilu | paling banyak 10 orang | OB | masa kerja paling lama 2 bulan |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum

Sigit Joyowardono

